



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA



2021

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Pengantar

Daftar isi

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Peradilan	1
B. Visi dan Misi	3
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
D. Indikator Kinerja Utama	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Matrik Indikator Kinerja Utama	13
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Sasaran Strategis PTUN Palangka Raya Tahun 2021	20
D. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2021	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Rekomendasi	51

Lampiran

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Laporan ini disusun sebagai bentuk implementasi penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4 (empat) lingkungan peradilan pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian dapat kami sampaikan dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran serta tenaga dalam penyelesaian laporan ini.

Palangka Raya, Pebruari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya resmi berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1998 oleh Menteri Kehakiman RI yaitu **Bpk. Prof. Dr. H. MULADI, SH** sampai saat ini, wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang terdiri 1 Kota dan 13 Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Barito Selatan dengan Ibu Kota BUNTOK;
2. Kabupaten Barito Timur dengan Ibu Kota TAMIANG LAYANG;
3. Kabupaten Barito Utara dengan Ibu Kota MUARA TEWEH;
4. Kabupaten Gunung Mas dengan Ibu Kota KUALA KURUN;
5. Kabupaten Kapuas dengan Ibu Kota KUALA KAPUAS;
6. Kabupaten Katingan dengan Ibu Kota KASONGAN;
7. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibu Kota PANGKALAN BUN;
8. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibu Kota SAMPIT;
9. Kabupaten Lamandau dengan Ibu Kota NANGA BULIK;
10. Kabupaten Murung Raya dengan Ibu Kota PURUK CAHU;
11. Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibu Kota PULANG PISAU;
12. Kabupaten Sukamara dengan Ibu Kota SUKAMARA;
13. Kabupaten Seruyan dengan Ibu Kota KUALA PEMBUANG;
14. Kota PALANGKARAYA

Propinsi Kalimantan Tengah dengan ibukotanya Palangka Raya terletak di bagian Tengah pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan propinsi Kalimantan Barat, sebelah timur dengan Kalimantan Selatan, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah utara dengan propinsi Kalimantan Timur.

Propinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak di antara 0 45" Lintang Utara 3 30" Lintang Selatan dan 111" Bujur Timur, dengan luas daratan 153.564 km² atau hanya 8,04 persen dari total luas daratan Indonesia.

Palangkaraya secara geografis terletak di antara 3 ° 50' LS – 1 ° 10' LU 110° 20' – 116 ° 0 BT dengan luas wilayah totalnya 157.983 km² dengan Jumlah Penduduk sekitar 2.202.599 Jiwa.

Daerah yang paling luas di propinsi Kalteng adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 23.700 km², kemudian Kabupaten Katingan dengan luas 17.800 km²

dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luas 16.496 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah Kota Palangka Raya dengan luas 2.399,50 km².

Sebelum tahun 2002 semula terdiri 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya dan pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 13 kabupaten dan 1 kota, adapun kabupaten yang dimekarkan adalah Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Katingan ;

Daerah aliran sungai yang terdapat di Propinsi Kalimantan Tengah adalah: Sungai Barito yang melintasi 4 kabupaten, Kahayan, Kapuas Kapuas, Sungai Mentaya, sungai Kumai, Sungai Seruyan, Sungai Katingan, Sungai Sabangau, Sungai Rungan, Sungai Busang dan puluhan anak sungai yang tersebar di 14 Kabupaten ;

Bahwa dengan keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya di Propinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian sengketa-sengketa TUN sebagai wujud kepedulian Mahkamah Agung RI dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Kalimantan Tengah.

Sebagai lembaga penyelenggara negara pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mendeskripsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila di tata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada.

B. VISI DAN MISI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di Tingkat Pertama di Propinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu :

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

Dan adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung "

MISI

1. *Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan, dan Modern.*
2. *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.*
3. *Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.*
4. *Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan tata

pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparaturnegara/pemerintah.

Program kerja pembaruan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang diimpikan warga peradilan termasuk independensi organisasi dan keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan sumber daya manusia.

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya harus mempertanggung jawabkan kinerjanya pada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah pada umumnya dan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada khususnya.

Mahkamah Agung RI melalui cetak birunya atau Blue Print telah menuangkan berbagai macam usaha perubahan dan perbaikan demi mewujudkan Badan Peradilan yang Agung diseluruh Indonesia secara ideal, dan melalui perubahan dan perbaikan tersebut semua Badan Peradilan diharapkan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi (IT) terpadu.

Aspek strategis organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses mencari keadilan dimana keadilan tersebut merupakan ujung tombak bagi pencari keadilan dalam memperjuangkan haknya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mempunyai beberapa aspek strategi yang harus dijalankan untuk mencapai suatu pengadilan yang berkualitas. Beberapa aspek strategi tersebut adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat aspek tersebut mempunyai pertanggung jawaban yang nilainya dapat dijadikan acuan kedepan yang lebih baik. Kedua sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari rencana strategis kita. Dari rencana strategis yang disusun berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga potensi-potensi yang ada.

Pembahasan dan potensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat dikelompokkan menjadi **analisis faktor internal** yang terdiri dari kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness) serta **analisis faktor eksternal** yang terdiri dari peluang (opportunity) dan tantangan yang dihadapi seperti yang telah disinggung sedikit pada maksud dan tujuan adanya Blue Print Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mempunyai 2 analisis yang dapat dijabarkan untuk mencari solusi yang tepat guna penanggulangan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Analisis Faktor Internal

a. Kekuatan (strenght)

Kekuatan-kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menyangkut hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian. Hal-hal tersebut mencakup :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan voorpost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Tengah.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

b. Kelemahan (weakness)

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat dirinci dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

➤ Aspek Proses Peradilan

- Belum maksimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

➤ Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

- Kurangnya tenaga administrasi diseluruh bagian baik Kepaniteraan dan bagian Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Palangka Raya.
- **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**
 - Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dalam arti masih kurang untuk menutupi kebutuhan dan rencana yang diajukan.
 - Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang belum sesuai dengan standar prototype Mahkamah Agung RI.

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk melakukan reformasi / perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek sebagai berikut :

- **Aspek Proses Peradilan**
 - Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**
 - Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berupa internet dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

b. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tantangan-tantangan yang dihadapi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang akan dihadapi dan dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi / perbaikan sebagaimana yang diharapkan adalah sebagai berikut :

➤ **Aspek Proses Peradilan**

- Belum adanya kepastian dari hasil tindak lanjut produk keadilan seperti yang diharapkan para pencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya seperti halnya di pengadilan negeri.

➤ **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya belum seluruhnya dapat menguasai teknologi informasi.

➤ **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara gugatan lebih cepat.
- Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi

secara elektronik salah satunya adalah digunakannya aplikasi E-Court pada PTUN Palangka Raya.

➤ **Aspek Sarana dan Prasarana**

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara ;
3. Peningkatan Kualitas SDM ;
4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan ;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ;

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Bahwa kedelapan Sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut diatas sudah dapat digambarkan Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya itu sendiri, dan

dapat pula dibuat suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan program sebagai berikut ;

1. Peningkatan penyelesaian perkara :

Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya setiap tahun mengalami pasang surut, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besar pun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Jumlah perkara yang diterima ;
- b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan .

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

Indicator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat :

- a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
- b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu
- c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
- d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu kepada para pihak
- e. Jumlah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada para pihak
- f. Jumlah eksekusi tepat waktu

3. Peningkatan Kualitas SDM ;

Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai indikatornya adalah :

- a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan Tehnis
- b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non tehnis

4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;

Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidak puasan atas pelayanan.

Adapun indicator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :

- a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti
 - b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan ;
Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi pada badan peradilan maka masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap Pengadilan dan sebagai indikator pencapaian peningkatan aksesibilitas tersebut dapat diukur melalui Prosentase perkara yang dapat dipublikasikan.
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ;
Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perlu adanya daya dukungan manajemen peradilan yang tersedia melalui DIPA.
Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka indikator pengukurnya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan anggaran;
7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN
Bahwa dengan adanya DIPA 05, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dipercayakan untuk menyelenggarakan perkara-perkara Prodeo dan sebagai indikator kinerja bahwa DIPA 05 tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal yang dapat dilihat dari jumlah dana yang tersedia untuk perkara Prodeo dengan realisasi dari pagu perkara prodeo.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
Prosentase penyelenggaraan operasional perkantoran yang berbasis Teknologi Informasi

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2016-2020.

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk tahap pertama harus dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan dasar dari berjalannya sebuah roda organisasi yang telah mempunyai tujuan, sasaran strategis dan juga program yang digunakan.

Dari indikator itu pula dapat dibuat sebuah gambaran kearah mana organisasi ini dijalankan. Pada setiap awal tahun , rencana kinerja harus sudah dibuat.

Berdasarkan Keputusan Ketua MA RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama, maka rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah sebagai berikut :

No.	Rencana Strategis	Indikator Rencana Strategis
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	- Prosentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti

A. MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menetapkan Matrik Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/369/K/KP.08.08/II/2020 tertanggal Pebruari 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara : Tingkat Pertama	a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan	Perbandingan antara perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara Sisa tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diputus		
2.	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara	a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Jumlah penyampaian fotocopy putusan kepada para pihak tepat waktu (pasal 51 A UU Peratun)	Perbandingan antara berkas perkara yang diputus dengan yang diminutasi		
		c. Jumlah Penyampaian pemberi-tahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu	Perbandingan antara persidangan dengan pemanggilan	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
		d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan/Penetapan Tepat Waktu kepada Para Pihak	Perbandingan antara putusan dan pemberitahuan putusan		
		e. Jumlah berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan kasasi (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI	Panitera	Laporan Bulanan
		f. Jumlah berkas yang diajukan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Peninjauan Kembali (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Tingkat Banding dan Mahkamah Agung RI		
				Panitera	Laporan Bulanan

			Agung RI			
3.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.	
		b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.	
4.	Peningkatan Akseibilitas Masyarakat terhadap peradilan (accses to justice)	Prosentase penyelesaian perkara yang dapat di publikasikan	Perbandingan prosentase putusan perkara yang sudah dapat di download di website (sesuai SK KMA No. 1-144 Th 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.	

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/369/K/KP.08.08/II/2020 tertanggal Pebruari 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat dilihat sebagai berikut :

LAMPIRAN : 1

Keputusan Ketua PTUN Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/
/K/KP.08.08/II/2020
Tanggal : Pebruari 2020

1. Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
2. Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
3. Nama Sub. Organisasi Organisasi : Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
4. Tugas : Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial kepada aparat peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan pengadilan
5. Fungsi :
 - a. Menerima dan Memproses administrasi pendaftaran perkara
 - b. Menyiapkan dan Mengatur rencana persidangan perkara
 - c. Menyelenggarakan Administrasi Persidangan
 - d. Mendokumentasikan berkas perkara dan pengarsipan
 - e. Menyampaikan putusan pengadilan kepada pihak-pihak
 - f. Menerbitkan dokumen putusan pengadilan.

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah Sisa Perkara Yang diselesaikan dengan Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun berjalan dengan Jumlah Perkara yang ada = 80%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	Perbandingan Jumlah Sisa Perkara Tahun Berjalan – Jumlah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya dengan jumlah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya = 10%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum : Banding, Kasasi dan PK	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding = 45% • Kasasi = 23% • Peninjauan Kembali = 95%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan	Berdasarkan Survey Kepuasan Layanan Publik = 75%	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah Putusan = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan lengkap dan tepat waktu	Perbandingan Jumlah Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK = 100%	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Jumlah Putusan perkara sengketa pilkada yang diupload diwebsites dengan Jumlah Perkara sengketa pilkada yang diputus = 0%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah Perkara Prodeo = 0%	Dirjen Badilmiltun dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu = 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	Perbandingan Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti Dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT = 75%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN : 2
Keputusan Ketua PTUN Palangka Raya
Nomor : W2-TUN6/
/K/KP.08.08/III/2019
Tanggal : Maret 2019

1. Nama Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG R.I
2. Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
3. Nama Sub. Organisasi Organisasi : Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
4. Tugas : Menyelenggarakan Koordinasi dan Pembinaan Dukungan Teknis Administrasi Organisasi dan Financial kepada seluruh unsur dilingkungan Pengadilan
5. Fungsi :
 - a. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Pembinaan Administrasi Kesekretariatan
 - b. Pembinaan dan Pelaksanaan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Umum dan Keuangan serta Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
 - c. Perlengkapan dan Ketatausahaan Administrasi Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di PTUN Palangka Raya	a. Persentase Tata Kelola dan Tata Adminstrasi di Kesekretariatan b. Persentase Pegawai yang Lulus mengikuti diklat dan pelatihan teknis dan non teknis c. Persentase Penyerapan Anggaran Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran	a. Persentase Tata Kelola dan Tata Adminstrasi di Kesekretariatan = 100% b. Persentase Pegawai yang Lulus mengikuti diklat dan pelatihan teknis dan non teknis = 100% c. Persentase Penyerapan Anggaran Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran = 95%	1. Sekretaris 2. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. Kasubbag Umum dan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana	Prosentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana.	Prosentase Penyerapan Anggaran Pengadaan Kebutuhan Sarana	1. Sekretaris 2. Kasubbag Umum dan Keuangan	Laporan Bulanan dan Laporan

	sesuai standar pelayanan peradilan yang prima		dan Prasarana = 100%		Tahunan
--	---	--	----------------------	--	---------

C. SASARAN STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka **Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2021** adalah Sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Prosentase penurunan sisa perkara d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 80% 10% 45 % 23 % 95 % 75 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu c. Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100% 100% 100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	0% 0%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan	➤ Prosentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti	75%

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut serta dalam rangka mewujudkan visi pengadilan yaitu “ **Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Yang Agung**”, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel :

Jumlah perkara setiap tahun mengalami peningkatan, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena seberapa besarpun perkara yang masuk maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Dalam peningkatan penyelesaian perkara dalam setiap tahun, maka ada 4 (empat) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan dicapai yaitu :

- a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Prosentase penurunan sisa perkara
- d. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - Banding
 - Kasasi
 - Peninjauan kembali
- e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien.

Indikator kinerja bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan tugasnya dengan melihat :

- a. Prosentase salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu.
- b. Prosentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus melalui Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sesuai dengan perintah lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung telah melaksanakan pemberian akses bagi warga yang tidak mampu. Indikator kinerja dari sasaran strategis ke tiga ini adalah :

- a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Prosentase putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti

Untuk sasaran strategis kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah menyiapkan sasaran yang harus dilaksanakan dan dicapai yaitu :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya manajemen pelayanan di PTUN Palangka Raya	a. Jumlah dokumen tata kelola dan tata administrasi b. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan dan pelatihan c. Penyelenggaraan operasional perkantoran	100% 100% 95 %
2.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaana sesuai standar pelayanan yang prima	➤ Prosentase jumlah sarana dan prasarana yang ada sesuai standar mutu	95 %

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	45 % 23 % 95 %
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	75 %
2.	Peningkatan Efectivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan lengkap dan tepat waktu	100 %
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang	0

	miskin dan terpinggirkan	diselesaikan	
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	75 %
5.	Meningkatnya Manajemen Pelayanan di PTUN Palangka Raya	a. Persentase tata kelola dan tata administrasi di Kesekretariatan	100 %
		b. Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat dan pelatihan teknis dan non teknis	100%
		c. Persentase penyerapan anggaran pemeliharaan dan operasional perkantoran	95 %
6.	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan Yang Prima	Persentase penyerapan anggaran pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana	100 %

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya **Tahun 2021** dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase, indeks, rata-rata , angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa

semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sbb:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Rencana Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
-------------------------	---	--

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

% Pencapaian Kinerja	=	$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$
----------------------	---	--

Memperhatikan Tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus (1) seperti tersebut diatas. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisi kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi serta sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dan indicator sasaran.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2021 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.

Tabel
Pengukuran Capaian Kinerja PTUN Palangka Raya Tahun 2021

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	88 %	110%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10 %	50 % Turun	300%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi Peninjauan Kembali	45 % 23 % 95 %	65,21 % 40 % 94,54%	144,91 % 173,91% 99,51%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75 %	80,66% Naik	107,55%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100 %	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan Tepat Waktu	100%	100 %	100 %
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	0	0	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100 %	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75 %	80%	106%

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019, 2020 dan 2021

Perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mengalami kemajuan atau perkembangan menuju yang lebih baik. Pada Tahun 2021 sisa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mengalami penurunan disebabkan adanya kenaikan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Perbaikan sarana prasarana penunjang khususnya pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam Tahun 2021 menyebabkan terjadinya peningkatan pelayanan peradilan menjadi lebih baik yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebesar 80,66 %. Perkembangan realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat kita lihat dari perbandingan antara tahun 2019, 2020 dan 2021.

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 60 % 1,5 % 50 % 25 % 95 % 95 %	100% 68,1% -133,33% Naik 46,67 % 50 % 96,67 % 79 %	100% 68,1% 100% 46,67 % 50 % 96,67 % 79 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100% 100%	0% 0%	0% 0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara tata usaha negara yang ditindak lanjuti	89 %	79,17 %	79,17 %

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 80 % 10 % 45 % 23 % 95 % 75 %	100% 91,67 % 71,42 % Naik 6,67 % 11,11 % 96,67 % 73,3 %	100% 114,59% 714,2 % 14,82 % 48,30 % 101,76% 97,73 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100% 100%	0% 0%	0% 0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara tata usaha negara yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	75%	0 %	0 %

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu h. Persentase penurunan sisa perkara i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali j. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 80 % 10 % 45 % 23 % 95 % 75 %	100% 88% 50% Turun 65,21 % 40 % 94,54 % 80,66 % Naik	100% 110% 300% 144,91% 173,91% 99,51 % 107,55 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100% 100%	0% 0%	0% 0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara tata usaha negara yang ditindak lanjuti	75 %	80%	106 %

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan Target Kinerja Jangka Menengah 2020-2024

Pengukuran realisasi kinerja dilihat beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun ini mendekati target dan ada beberapa bagian yang sudah memenuhi target, Ini menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan perencanaan strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah seimbang.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 dengan target kinerja jangka menengah tahun 2020-2024 dalam RENSTRA PTUN Palangka Raya adalah sebagai berikut :

N O	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Terwujud-nya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	60 %	80 %	80%	68,1%	91,67%	88%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1,5 %	10 %	10 %	-133,33% Naik	71,42% Naik	50% Turun
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		- Banding	50 %	45 %	45 %	46,67 %	6,67 %	65,21 %
		- Kasasi	25 %	23 %	23 %	50 %	11,11%	40%
		- Peninjauan Kembali	95 %	95 %	95 %	96,67 %	96,67%	94, 54%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 %	75 %	75 %	79 %	100 %	100 %

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%	100%	0	100%	100%	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	0	0	0	0
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posyankum)	100%	100%	100%	0%	0%	0%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	- Persentase putusan perkara tata usaha negara yang ditindak lanjuti	89%	75%	75 %	79,17 %	0 %	80%

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

4.1. Analisis keberhasilan kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat capaian kinerja/ keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian yang baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yaitu mengadili perkara yang menjadi kewenangan di tingkat pertama.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menilai keberhasilan kinerja itu dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah dapat mencapai keberhasilan yang ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2020-2024.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah melakukan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja tahun 2021, sehingga mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis kinerja tahun 2020-2024.

➤ Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya menggunakan indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) yaitu perbandingan jumlah perkara masuk dan putus.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sudah dikatakan berkinerja baik dengan nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 88%. Penetapan target minimal clearance rate 80% ini karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih memiliki tunggakan perkara. Tunggakan perkara

tersebut dapat diselesaikan semua sesuai waktu dan menangani perkara yang masuk sesuai aturan yang telah ditetapkan dan berusaha untuk meminimalkan tunggakan menjadi lebih rendah.

a. Perkara Gugatan

Perkara gugatan yang tersisa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

TAHUN	SISA TAHUN LALU	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA AKHIR
2019	6	38	24	6	14
2020	14	34	34	10	4
2021	4	39	31	5	6

b. Perkara Banding

Perkara Banding yang tersisa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dari Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2019	16	14	0
2020	24	19	0
2021	17	19	0

c. Perkara Kasasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai pengadilan tingkat pertama selama tahun 2019, 2020 dan 2021 telah menerima permohonan kasasi dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2019	8	8	-
2020	17	5	0
2021	13	15	0

d. Perkara peninjauan Kembali (PK)

Keadaan perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2019	1	-	-
2020	2	1	0
2021	3	1	0

e. Perkara yang dimohonkan eksekusi

Jumlah perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi oleh pihak selama tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

TAHUN	MASUK	PUTUS	CABUT
2019	5	-	-
2020	1	-	-
2021	2	-	-

f. Keuangan Perkara

Keadaan keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka raya selama periode Januari s.d Desember 2021 sebagai berikut :

- Saldo Awal : Rp. 24.840.350,-
- Penerimaan : Rp. 136.964.700,- +
- Jumlah : Rp. 161.805.050,-
- Pengeluaran : RP. 122.031.850,- -
- Saldo : RP. 39.773.200,-

g. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2021 adalah tidak ada pengaduan yang diterima. Sesuai dengan pedoman Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

NO.	PENGADUAN	JUMLAH SURAT
1	Pengaduan yang masuk	: Nihil
2	Pengaduan yang sudah diselesaikan	: Nihil
3	Pengaduan yang masih diproses	: Nihil
4	Pengaduan yang diteruskan ke Bawas MARI	: Nihil
5	Pengaduan yang tidak layak ditindak lanjuti	: Nihil

4.2. Analisis Kegagalan

Ada beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau belum mencapai prosentase maksimal yaitu salah satunya kegiatan penurunan sisa perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimana belum mencapai hasil yang memuaskan yaitu penurunan sisa perkara yang diharapkan setiap tahun turun meskipun hanya 0,001%. Penurunan sisa perkara setiap tahun tidak dapat dipenuhi sesuai target. Karena perkara yang masuk setiap tahunnya juga berubah dan perkara yang dihadapi kualitasnya berbeda, Ada yang butuh waktu yang cukup untuk penyelesaiannya.

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan juga menjadi sorotan yang utama dikarenakan putusan akhir pengadilan belum semua dijalankan eksekusinya oleh pihak Tergugat. Ini yang menjadikan masalah, tidak adanya sanksi bagi pihak Tergugat yang belum melaksanakan eksekusi apalagi tidak melaksanakan eksekusi, ini membuktikan bahwa putusan pengadilan belum diterima oleh Tergugat dalam hal ini pihak pemerintah, karena jika menjalankan putusan pengadilan dengan mengabaikan eksekusinya membuat nilai kerja pihak pemerintah buruk di mata masyarakat. Dua hal inilah yang menjadi ada sedikit kegagalan dalam menjalankan kinerja untuk memenuhi target yang sudah ditentukan dalam sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

➤ Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Faktor-faktor sumber daya yang memiliki andil dan menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia yang ada sehingga menyulitkan penempatan pegawai yang proporsional.
2. Sulitnya minta tambahan formasi pegawai dimana jumlah pegawai yang ada terutama staf tidak dapat mencukupi dibanding dengan pekerjaan yang ada.

3. Penempatan formasi pegawai baru ditetapkan oleh pusat, tidak memenuhi aspirasi akan permohonan penambahan formasi pegawai.
4. Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

Dengan tenaga yang minim berusaha untuk bisa melakukan semua pekerjaan itu dengan baik. Dengan pendekatan yang baik yang dilakukan pimpinan kantor semua dapat diatasi tanpa beban. Tugas pokok dan fungsi yang ada telah mendapat keberhasilan dengan ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2021 maupun sasaran strategis jangka menengah.

Dalam menjawab berbagai permasalahan tentang sumber daya tersebut, maka dibutuhkan suatu langkah-langkah antara lain :

1. Penempatan formasi pegawai baru harus memperhatikan peta kekuatan pegawai pada masing-masing satuan kerja.
2. Dalam menempatkan pegawai sedapat mungkin mempertimbangkan aspirasi satuan kerja di daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkala dengan memperbanyak kegiatan bimbingan teknis dan workshop dengan sistem memperbanyak simulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
4. Mengusulkan penambahan pegawai dan menerima pegawai melalui jalur mutasi.
5. Mengusulkan peningkatan anggaran belanja pada DIPA pada tahun anggaran 2021 khususnya yang berkenaan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk realisasi anggarannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mengajukan anggaran DIPA yang telah diatur sebaik mungkin untuk keperluan kantor. Pengajuan ini sesuai dengan rencana strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Terpenuhinya sasaran strategis yang ada indikator kinerja utama membawa dampak positif bagi pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Anggaran yang diajukan juga dipergunakan di bagian kepaniteraan perkara maupun hukum untuk kemajuan pelayanan terhadap masyarakat terutama para pencari keadilan.

➤ **Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya telah mempunyai rencana program atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2021 dan untuk jangka menengah tahun 2020-2024.

Program atau kegiatan ini sangat menunjang sekali untuk keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ke masa yang akan datang. Program-program ini diantaranya yang sangat diperlukan yaitu :

1. program penyelesaian perkara,
2. peningkatan tertib administrasi dan
3. Tertib dokumen tata kelola
4. Kualitas sumber daya manusia.
5. Operasional perkantoran
6. Jumlah sarana dan prasarana.

Penyelesaian perkara ini ditujukan untuk para pencari keadilan agar merasa dilayani dengan baik dan merasa puas, Pelayanan penyelesaian perkara ini harus didukung adanya kualitas sumber daya manusia yang memenuhi syarat kejujuran, kepintaran. Kualitas sumber daya manusia

sangat diperlukan untuk tertib administrasi perkara. Kualitas sumber daya manusia yang baik dan layak dapat menunjang keberhasilan suatu unit kerja.

Keenam kegiatan yang ada dalam program tersebut pelaksanaannya harus diawasi oleh instansi yang lebih tinggi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan tetap dijalurnya.

Kesemua program itu harus mendapat dukungan agar berjalan dengan baik, terutama dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis baik dari Mahkamah Agung RI ataupun dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Pemenuhan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk peningkatan / keberhasilan program yang dibuat dan dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Pencapaian perjanjian kinerja itu telah tercantum dalam program / kegiatan yang ada dan menunjang keberhasilan peradilan terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 mengacu kepada Undang-Undang RI, Peraturan Presiden RI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 seperti :

1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

6. Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. DIPA BUA Tahun Anggaran 2021 No. DIPA-005.01.2.578843/2021 Tanggal 23 Nopember 2020 dan DIPA Dirjenmiltun Tahun Anggaran 2021 No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tanggal 23 Nopember 2020;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial No : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA Tahun 2021 No. DIPA-005.01.2.578843/2021 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tanggal 23 Nopember 2021 mempunyai 3 (Tiga) Program untuk kelancaran dalam fungsi dan sub fungsi kegiatan seperti :

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA).

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan :

- ❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :
 - Layanan Perkantoran (1066.EAA.001) dengan sub keluaran :
 - Gaji dan Tunjangan (001)
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)
 - Layanan Umum (1066.EAC.003) dengan sub keluaran :
 - Non Operasional Satker Daerah (052)
- ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :
 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1071.EAD.001) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (052)

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF).

Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan :

❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059.BBA) dengan keluaran :

▪ Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN (1059.BBA.001) dengan sub keluaran :

– Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051).

❖ Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (1059.QBA) dengan keluaran :

▪ Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran :

– Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (051)

▪ Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.QBA.002) dengan sub keluaran :

– Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (051)

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui **DIPA BUA Tahun 2021 No. DIPA-005.01.2.578843/2021 Tanggal 23 Nopember 2020** dengan nilai pagu awal Rp. 4.994.545.000,- mengalami revisi DIPA sebanyak 4 kali, Sedangkan untuk **DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tanggal 23 Nopember 2020 dengan nilai pagu Rp. 38.500.000,-**.

Adapun perincian dari DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2021 tanggal 23 Nopember 2020 sampai pada Revisi ke-4 dan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2021 tanggal 23 Nopember 2020 menurut Program, Kegiatan dan Keluaran adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen (005.01.WA) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 5.146.470.000,-.

Dalam Program Dukungan Manajemen terdapat kegiatan :

❖ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066) dengan keluaran :

- Layanan Perkantoran (1066.EAA.001) dengan sub keluaran :
 - Gaji dan Tunjangan (001) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.687.493.000,-.
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 1.185.377.000,-.
 - Layanan Umum (1066.EAC.003) dengan sub keluaran :
 - Non Operasional Satker Daerah (052) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 8.600.000,-.
 - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071) dengan keluaran :
 - Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1071.EAD.001) dengan sub keluaran:
 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (052) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 265.000.000,-.
 - 2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.05.BF) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 38.500.000,-.
- Dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terdapat kegiatan :
- ❖ Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (1059.BBA) dengan keluaran :
 - Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan TUN (1059.BBA.001) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Pengamanan Sidang (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 2.500.000,- .
 - ❖ Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (1059.QBA) dengan keluaran :
 - Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (1059.QBA.001) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 33.000.000,-.

- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1059.QBA.002) dengan sub keluaran :
 - Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (051) dengan pagu DIPA sebesar Rp. 3.000.000,-.

Dalam mengelola keuangan negara, pembelanjaan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Belanja Pegawai = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pegawai seperti Gaji Pegawai, Tunjangan istri/suami, Tunjangan anak, Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional), Tunjangan Umum dan Tunjangan lainnya.
2. Belanja Barang = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja setiap bulannya untuk keperluan sehari – hari kantor seperti Belanja Keperluan Perkantoran (ATK, internet, Satpam, Sopir dan Pesuruh), Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan Aset Bergerak dan Belanja lainnya.
3. Belanja Modal = Pembayaran yang dibayarkan untuk keperluan Belanja Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung, Belanja Pengadaan Meubelair, Belanja Pengadaan Alat Pengolah Data, Belanja Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor).

Untuk Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam mengelola keuangan negara melalui 2 DIPA Tahun 2021 No. DIPA-005.01.2.578843/2021 dan No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tanggal 23 Nopember 2020 dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

D.1. Belanja Pegawai

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan jumlah sampai saat ini 23 Pegawai dan Hakim telah lakukan penganggaran untuk gaji, honorarium dan

tunjangan dalam DIPA No. DIPA-005.01.2.578843/2021 revisi ke 4 Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.687.493.000,-. Dalam pelaksanaan DIPA selama Tahun Anggaran 2021 telah menyerap dana sebesar **Rp. 3.415.895.956,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 43,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 271.597.044,- atau sebesar **92,63%** dari pagu DIPA yang ada.

D.2. Belanja Barang

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya memerlukan barang habis pakai untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan untuk belanja barang dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2021 Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.193.977.000,-. Dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya selama Tahun Anggaran 2021 telah menyerap dana DIPA BUA sebesar **Rp. 1.192.263.627,-** dan Pengembalian sebesar Rp. 0,- sehingga terjadi realisasi dibawah anggaran sebesar Rp. 1.713.373,- atau sebesar **99,86%** dari pagu DIPA BUA. Hal ini terjadi karena disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga mempengaruhi jumlah penyerapan pagu DIPA yang disediakan. Adapun Penyerapan belanja barang tersebut terdiri :

- Belanja Barang Operasional (5211) terserap sebesar Rp. 626.163.000,- atau 99,84% yang terdiri dari belanja :
 - Belanja Keperluan Perkantoran terserap sebesar Rp. 545.950.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat terserap sebesar Rp. 4.400.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Honor Operasional Satker sebesar Rp. 34.380.000,- atau 97,17% dari pagu DIPA.
 - Belanja Barang Operasional Lainnya sebesar Rp. 41.433.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

- Belanja Barang Persediaan (5218) terserap sebesar Rp. 48.000.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
 - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terserap sebesar Rp. 48.000.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Jasa (5221) terserap sebesar Rp. 100.155.618,- atau 99,31% terdiri dari belanja :
 - Belanja Langganan Listrik terserap sebesar Rp. 74.355.790,- atau 99,14% dari pagu DIPA.
 - Belanja Langganan Telepon terserap sebesar Rp. 749.828,- atau 93,73% dari pagu DIPA.
 - Belanja Langganan Air terserap sebesar Rp. 900.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Sewa Rumah Hakim sebesar Rp. 22.950.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Jasa Lainnya Sebesar Rp. 1.200.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Pemeliharaan (5231) terserap sebesar Rp. 358.140.000,- atau 100,00% terdiri dari belanja :
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terserap sebesar Rp. 198.654.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya terserap sebesar Rp. 33.932.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terserap sebesar Rp. 124.554.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) terserap sebesar Rp. 24.196.428,- atau 100,00% terdiri dari belanja:
 - Belanja Perjalanan Biasa terserap sebesar Rp. 51.645.009,- atau 99,99% dari pagu DIPA.

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota terserap sebesar Rp. 560.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
- Belanja Barang Non Operasional (5212) terserap sebesar Rp. 8.600.000,- atau 100,00% yang terdiri dari belanja :
 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya terserap sebesar Rp. 3.600.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.
 - Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 terserap sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100,00% dari pagu DIPA.

Sedangkan DIPA Dirjen Badilmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2021 Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 38.500.000,-, realisasi anggaran **Rp. 33.000.000,-** atau **85,71%** dari pagu DIPA. hal ini disebabkan karena Belanja Pengamanan Sidang tidak ada digunakan dan Belanja penanganan perkara prodeo tidak ada digunakan karena tidak ada perkara prodeo yang masuk sehingga dana yang ada tidak dapat digunakan.

D.3. Belanja Modal

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya telah lakukan pengusulan sarana dan prasarana untuk belanja modal untuk menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi dalam DIPA BUA No. DIPA-005.01.2.578843/2021 Tahun Anggaran 2021 terdapat anggaran belanja modal dengan pagu DIPA sebesar Rp. 265.000.000,- dengan realisasi **Rp. 264.980.000,-** atau **99,99%** dari pagu DIPA.

**DAFTAR REALISASI ANGGARAN 2 DIPA TAHUN 2021
PER 31 DESEMBER 2021
(dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	Bel. Pegawai (01)	3.687.493.000,-	3.415.895.956,-	(271.597.044,-)	92,63
2.	Bel. Barang (01)	1.193.977.000	1.192.263.627,-	(1.713.373,-)	99,86
	Bel. Barang (05)	38.500.000,-	33.000.000,-	(5.500.000,-)	85,71
3.	Bel. Modal (01)	265.000.000,-	264.980.000,-	(20.000,-)	99,99
	Jumlah Belanja	5.184.970.000,-	4.906.139.583,-	(278.830.417,-)	94,62

**DAFTAR REALISASI PNPB 2 DIPA PER 31 DESEMBER TAHUN 2021
(dalam Rupiah)**

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	17.107.000,-	13.741.881,-	(3.365.119,-)	80,33
2.	DIPA 05	10.000.000,-	12.681.500,-	2.681.500,-	126,82
	Jumlah	27.107.000,-	26.423.381,-	(683.619,-)	97,48

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN :

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah salah satu Pengadilan di Indonesia yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada di Tingkat Pertama di Propinsi Kalimantan Tengah, dan sejalan dengan tugas pokok tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merumuskan Visi atau suatu gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dimana Visi tersebut relevan dengan rumusan Visi MARI yang disampaikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 September 2009 di Palembang yaitu : “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Dan adapun Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA YANG AGUNG “

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, spesifik dan terukur.

Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara ;
3. Peningkatan Kualitas SDM ;
4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan ;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung ;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;

8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ;

B. REKOMENDASI :

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN PERKARA TAHUNAN
BULAN JANUARI S/D 31 DESEMBER TAHUN 2021

Formulir LI - T14

NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN LALU	MASUK	DISMISSAL	PERLAWANAN	CABUT	PUTUS	SISA	PERMOHONAN				KETERANGAN
									BANDING	KASASI	PENINJAUAN KEMBALI	EKSEKUSI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PERTANAHAN	1	16	-	-	4	8	5	6	2	1	1	
2	KEPEGAWAIAN	1	3	-	-	-	4	-	2	-	-	-	
3	PERIZINAN	-	1	-	-	-	1	-	1	4	-	-	
4	LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	TENDER/PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
6	BADAN HUKUM/PAKPOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	-	7	-	-	-	6	1	5	-	1	1	
8	KEPALA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	PROSES PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	PENGANTIAN ANTAR WAKTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	KIP	-	6	-	-	-	6	-	-	5	-	-	
13	PENGADAAN TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	FIKTI POSITIF	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
15	PENYALAHGUNAAN WEWENANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	LAIN LAIN	2	2	1	-	-	3	-	2	1	-	-	
JUMLAH		4	39	1	-	5	31	6	16	12	2	2	



PALANGKA RAYA, 31 DESEMBER, 2021
PALANGKA RAYA

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

ARI PRABOWO, S.H., M.H.
NIP. 19731030 199803 1 002

OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama :

1. Sisa Perkara Tahun 2020 : 4 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01	24/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	07-09-2020	1. HIDEN; 2. DOLE; 3. UHING; 4. DEWI; 5. RUSIANA; 6. BAHING; 7. UNYE SAPIA; 8. INYOK; 9. LUHING; 10.RUSLIYA.	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
02	27/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	08-10-2020	MUNARI	KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) / AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR)
03	28/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	03-11-2020	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN
04	31/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	10-12-2020	JHON KENEDY	1. BUPATI BARITO UTARA; 2. CAMAT LAHEI;

2. Perkara Masuk Tahun 2021 : 39 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL MASUK	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT/TERMOHON
01	1/P/FP/2021/PTUN.PLK (PERMOHONAN)	04-01-2021	EFFENDI BUHING	BUPATI LAMANDAU
02	1/G/TF/2021/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	07-01-2021	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI	1. BUPATI SUKAMARA; 2. LURAH MENDAWAI, SUKAMARA
03	2/P/FP/2021/PTUN.PLK (PERMOHONAN)	08-01-2021	ISLIA LILIS	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
04	3/P/FP/2021/PTUN.PLK (PERMOHONAN)	08-01-2021	ANDRY KP. YUNI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
05	2/G/2021/PTUN.PLK (PERIZINAN)	08-01-2021	ISTI SU'ILAH	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
06	3/G/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	01-02-2021	Drs. SANGGUL, MT	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
07	4/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	05-02-2021	NIBEL, S.Sos	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
08	5/G/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	11-02-2021	WANCINO	BUPATI KATINGAN
09	6/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	18-02-2021	AMAT	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAPUAS
10	7/G/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	22-02-2021	SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
11	8/G/2021/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	25-02-2021	ALIANSI MASYARAKAT PEDULI DEMOKRASI JUJUR DAN ADIL	1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (KPU); 2. BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
12	9/G/2021/PTUN.PLK (TENDER)	17-03-2021	MARTIASI UNIK GAWEI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNANGEDUNG PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU. DKK
13	10/G/2021/PTUN.PLK (DESA)	17-03-2021	GELLI P. MANAN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAU

14	11/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	23-03-2021	IBEN DM,SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
15	12/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	19-04-2021	HARLISON	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
16	13/G/2021/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	30-04-2021	1. NAOMI KRISTIANIGSIH 2. EKA RAHMAWATI	KEPALA DESA LAGAN
17	14/G/2021/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	30-04-2021	1. DARYONO 2. SALAMIAH	KEPALA DESA BATUAH
18	15/G/KI/2021/PTUN.PLK (KOMISI INFORMASI)	06-05-2021	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS	KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI
19	16/G/2021/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	19-05-2021	1. SUHARDI 2. ISMAIL 3. MISRANI	KEPALA DESA LIANG NAGA
20	17/G/2021/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	29-05-2021	RENOLD HADINATA	KEPALA DESA MADARA
21	18/G/KI/2021/PTUN.PLK (KOMISI INFORMASI)	31-05-2021	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
22	19/G/KI/2021/PTUN.PLK (KOMISI INFORMASI)	31-05-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAPUAS	1. MILAWATI; 2. MEGAWATI; 3. M. SUPIANOR; 4. HERLINA
23	20/G/KI/2021/PTUN.PLK (KOMISI INFORMASI)	31-05-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
24	21/G/KI/2021/PTUN.PLK (KOMISI INFORMASI)	31-05-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
25	22/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	03-06-2021	RENY FERI SULASTRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
26	23/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	07-06-2021	GANTIADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
27	24/G/KI/2021/PTUN.PLK (KOMISI INFORMASI)	18-06-2021	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
28	25/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	18-06-2021	Dra. ADJIN WIDEN, SH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
29	26/G/2021/PTUN.PLK (DESA/LAIN-LAIN)	22-06-2021	1. SUWENDIE; 2. MARLIANA; 3. MELIA; 4. LEO MARKADOMING GUS; 5. GENDRI; 6. IMBO	KEPALA DESA PAHAWAN

30	27/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	28-06-2021	1. KHRIS SUHARTA; 2. ARISANDI ABEL;	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
31	28/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	19-07-2021	1. SITAWATI MAYA DEWI; 2. ERWIN HUDOYONO HANDAYANA;	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
32	29/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	16-09-2021	YUSPIANSYAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR
33	30/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	26-10-2021	ERUJONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
34	31/G/2021/PTUN.PLK	02-11-2021	1. AYA RIKA; 2. ERNIE, S.Pd.,MM; 3. HARISONLIMIN; 4. ANA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
35	32/G/2021/PTUN.PLK	02-11-2021	1. AYA RIKA; 2. ERNIE, S.Pd.,MM; 3. HARISONLIMIN; 4. ANA	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
36	33/G/2021/PTUN.PLK	17-11-2021	ERUJONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
37	34/G/2021/PTUN.PLK	06-12-2021	SUDIANTO	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA KALANIS, KECAMATAN DUSUN HILIR, KABUPATEN BARITO SELATAN
38	35/G/2021/PTUN.PLK	15-12-2021	Drs. HERWIN	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
39	36/G/2021/PTUN.PLK	31-12-2021	1. SAPERIL Bin M. TAYIB; 2. SYAHRUL Bin M. TAYAB; 3. NURSARI Bin M. TAYIB; 4. MEGAWATI Bin M. TAYIB; 5. MASNI YATI Bin TAYIB	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN BARAT

- Keadaan Perkara Tingkat Banding
Permohonan Banding Tahun 2021 : 17 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN BANDING	PEMBANDING	TERBANDING
01	27/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN) MUNARI MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DODDY WONGSO (TII.INT)	08-03-2021	MUNARI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DODDY WONGSO (TII.INT)
02	28/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) LAOSMA PURBA MELAWAN BUPATI SERUYAN	23-03-2021	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN
03	31/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN) JHON KENEDY MELAWAN - BUPATI BARITO UTARA; - ALI SUPERJAN (TII.INT)	13-04-2021	- BUPATI BARITO UTARA; - ALI SUPERJAN (TII.INT)	JHON KENEDY
04	2/G/2021/PTUN.PLK (PERIZINAN) CV. GRAHA TEKNIK diwakili ISTI SU'ILAH MELAWAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	11-05-2021	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	CV. GRAHA TEKNIK diwakili ISTI SU'ILAH
05	5/G/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) WANCINO MELAWAN BUPATI KATINGAN	17-05-2021	WANCINO	BUPATI KATINGAN
06	3/G/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) Drs. SANGGUL MELAWAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	18-05-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	Drs. SANGGUL
07	1/G/TF/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN) Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI MELAWAN 1. BUPATI SUKA MARA 2. LURAH MENDAWAI	21-05-2021	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI	1. BUPATI SUKA MARA 2. LURAH MENDAWAI

08	4/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN) NIBEL, S.Sos <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DEDY SATRIA (TII.INT)	29-06-2021	NIBEL, S.Sos	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DEDY SATRIA (TII.INT)
09	10/G/2021/PTUN.PLK (DESA) GELLI P. MANAN <u>MELAWAN</u> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAU	22-07-2021	GELLI P. MANAN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAU
10	11/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN) IBEN DM, SE <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	10-08-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	IBEN DM, SE
11	13/G/2021/PTUN.PLK (DESA) 1. NAOMI KRISTIANIGSIH 2. EKA RAHMAWATI <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA LAGAN	25-08-2021	1. NAOMI KRISTIANIGSIH 2. EKA RAHMAWATI	KEPALA DESA LAGAN
12	14/G/2021/PTUN.PLK (DESA) 1. DARYONO 2. SALAMIAH <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA BATUAH	25-08-2021	1. DARYONO 2. SALAMIAH	KEPALA DESA BATUAH
13	16/G/2021/PTUN.PLK (DESA) 1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRANI. <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA LIANG NAGA	03-09-2021	KEPALA DESA LIANG NAGA	1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRANI.
14	12/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN) HARLISON <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR	07-09-2021	HARLISON	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
15	22/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN) RENY FERI SULASTRI <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	15-09-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	RENY FERI SULASTRI
16	26/G/2021/PTUN.PLK	01-10-2021	1. SUWENDIE;	KEPALA DESA PAHAWAN

	(PERANGKAT DESA) 1. SUWENDIE; 2. MARLIANA; 3. MELIA; 4. LEO MARKADO MINGGUS; 5. GENDRI; 6. IMBO <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA PAHAWAN		2. MARLIANA; 3. MELIA; 4. LEO MARKADO MINGGUS; 5. GENDRI; 6. IMBO	
17	25/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN) Dra. ADJIN WIDEN, SH <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA RUSLI (TII Int)	28-10-2021	RUSLI (TII Int)	Dra. ADJIN WIDEN, SH

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
Permohonan Kasasi Tahun 2021 : 13 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN KASASI	PEMOHON KASASI	TERMOHON KASASI
01	10/G/2020/PTUN.PLK Jo. 261/B/2020/PT.TUN.JKT (DESA) WANCINO MELAWAN - BUPATI KATINGAN - EMAN (TII INT)	13-01-2021	WANCINO	- BUPATI KATINGAN - EMAN (TII INT) Catatan : Ps. 45 A. Berkas Tidak Dikirim Penetapan Tgl 15-02-2021
02	11/G/2020/PTUN.PLK Jo. 303/B/2020/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) SUHANDI MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT; - MUHAMMAD JAINURI (TII INT).	10-02-2021	SUHANDI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT; - MUHAMMAD JAINURI (TII INT)
03	32/G/2019/PTUN.PLK. Jo. 279/B/2020/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) ERWIN BARUS. DKK MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR; - PT. PERTAMINA PERSERO (T II INT)	18-02-2021	ERWIN BARUS. DKK	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR; - PT. PERTAMINA PERSERO (T II INT) Catatan : Berkas dikembalikan, tanggal 24 Mei 2021 Ps. 46 (tenggang waktu)
04	17/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 22/B/2021/PT.TUN.JKT (PERIJINAN) PT. PADANG MULIA MELAWAN BUPATI BARITO TIMUR	20-04-2021	PT. PADANG MULIA	BUPATI BARITO TIMUR
05	19/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 22/B/2021/PT.TUN.JKT (PERIJINAN) PT. PADANG MULIA MELAWAN - BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA (TII.INT)	20-04-2021	PT. PADANG MULIA	- BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA (TII.INT)
06	20/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 32/B/2021/PT.TUN.JKT (PERIJINAN)	11-05-2021	PT. PADANG MULIA	- BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA (TII.INT)

	PT. PADANG MULIA MELAWAN - BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA (TII.INT)			
07	15/G/KI/2021/PTUN.PLK. (KOMISI INFORMASI) KANTOR PERTANAHAN KAB. KAPUAS MELAWAN KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI	05-08-2021	KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEI	KANTOR PERTANAHAN KAB. KAPUAS
08	20/G/KI/2021/PTUN.PLK. (KOMISI INFORMASI) BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MELAWAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA	10-08-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
09	31/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 110/B/2021/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) JHON KENEDY MELAWAN - BUPATI BARITO UTARA; - CAMAT LAHEI	19-08-2021	- BUPATI BARITO UTARA; - CAMAT LAHEI	JHON KENEDY
10	19/G/KI/2021/PTUN.PLK. (KOMISI INFORMASI) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAPUAS MELAWAN 1. MILAWATI; 2. MEGAWATI; 3. M. SUPIANOR; 4. HERLINA;	20-08-2021	1. MILAWATI; 2. MEGAWATI; 3. M. SUPIANOR; 4. HERLINA;	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAPUAS
11	18/G/KI/2021/PTUN.PLK. (KOMISI INFORMASI) PEMANTAU KEUANGAN NEGARA MELAWAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	26-08-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
12	21/G/KI/2021/PTUN.PLK. (KOMISI INFORMASI) BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR MELAWAN PEMANTAU KEUANGAN NEGARA BUPATI	26-08-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
13	2/G/2021/PTUN.PLK Jo. 153/B/2021/PT.TUN.JKT (PERIJINAN) CV. GRAHA TEHNIK	05-10-2021	CV. GRAHA TEHNIK	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

	<u>MELAWAN</u> KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR			
--	---	--	--	--

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**
 Permohonan PK Tahun 2021 : 3 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI	PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
1	7/G/2019/PTUN.PLK Jo. 61/B/2019//PT.TUN.JKT Jo. 157 K/TUN/2020 (PERTANAHAN) ANDREAS, S.T.,M.T <u>MELAWAN</u> GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	29-03-2021	ANDREAS, S.T.,M.T	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
2	20/G/2019/PTUN.PLK Jo. 33/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 353 K/TUN/2020 (PERTANAHAN) MUCHAMAT JAINURI <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	30-03-2021	MUCHAMAT JAINURI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
3	16/G/2021/PTUN.PLK Jo. 235/B/2021/PT.TUN.JKT (DESA) 1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRAN; <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA LIANG NAGA	29-12-2021	1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRAN;	KEPALA DESA LIANG NAGA

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus : 4 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
01	24/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	07-01-2021	01. HIDDEN; 02. DOLE; 03. UHING; 04. DEWI; 05. RUSIANA; 06. BAHING; 07. UNYE SAPIA; 08. INYOK; 09. LUHING; 10. RUSLIYA	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR <i>Catatan : Tidak mengajukan upaya banding</i>
02	27/G/2020/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	23-02-2021	MUNARI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DODDY WONGSO (TII.INT).
03	28/G/2020/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	04-03-2021	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN
04	31/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	01-04-2021	JHON KENEDY	1. BUPATI BARITO UTARA; 2. ALI SUPERJAN (TII.INT).

- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu : **28** Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
01	1/P/FP/2021/PTUN.PLK (PERMOHONAN)	01-02-2021	EFFENDI BUHING	BUPATI LAMANDAU
02	2/P/FP/2021/PTUN.PLK (PERMOHONAN)	04-02-2021	ISLIA LILIS	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
03	3/P/FP/2021/PTUN.PLK (PERMOHONAN)	04-02-2021	ANDRY KP. YUNI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
04	8/G/2021/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	04-03-2021	ALIANSI MASYARAKAT PEDULI DEMOKRASI JUJUR DAN ADIL	1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (KPU); 2. BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR; <u>Keterangan :</u> - Dismissal tgl. 4-3-2021; - Tidak ada upaya perlawanan;
05	2/G/2021/PTUN.PLK (PERIJINAN)	28-04-2021	CV. GRAHA TEKNIK diwakili ISTI SU'ILAH	KEPELA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
06	1/G/TF/2021/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	29-04-2021	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI	1. BUPATI SUKAMARA; 2. LURAH MENDAWAI, SUKAMARA
07	3/G/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	05-05-2021	Drs. SANGGUL, MT	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
08	5/G/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	06-05-2021	WANCINO	BUPATI KATINGAN
09	7/G/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	09-06-2021	SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
10	4/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	16-06-2021	NIBEL, S.Sos	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - DEDY SATRIA

11	10/G/2021/PTUN.PLK (DESA)	08-07-2021	GELLI P. MANAN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAU
12	11/G/2021/PTUN.PLK (DESA)	22-07-2021	IBEN DM, SE	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
13	15/G/KI/2021/PTUN.PLK	29-07-2021	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS	KELOMPOK TANI SIMPEI KARUHEN
14	20/G/KI/2021/PTUN.PLK	29-07-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA
15	18/G/KI/2021/PTUN.PLK	05-08-2021	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
16	21/G/KI/2021/PTUN.PLK	05-08-2021	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR	PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)
17	19/G/KI/2021/PTUN.PLK	09-08-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAPUAS	1. MILAWATI; 2. MEGAWATI; 3. M. SUPIANOR; 4. HERLINA
18	13/G/2021/PTUN.PLK	12-08-2021	1. NAOMI KRISTIANINGSIH; 2. EKA RAHMAWATI SURYANI	KEPALA DESA LAGAN
19	14/G/2021/PTUN.PLK	12-08-2021	1. DARYONO; 2. SALAMIAH	KEPALA DESA BATUAH
20	12/G/2021/PTUN.PLK	19-08-2021	HARLISON	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
21	24/G/KI/2021/PTUN.PLK	24-08-2021	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
22	16/G/2021/PTUN.PLK	02-09-2021	1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRANI;	KEPALA DESA LIANG NAGA
23	17/G/2021/PTUN.PLK	02-09-2021	RENOLD HADINATA	KEPALA DESA MADARA

24	22/G/2021/PTUN.PLK	08-09-2021	RENY FERI SULASTRI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
25	26/G/2021/PTUN.PLK	29-09-2021	1. SUWENDIE; 2. MARLIANA; 3. MELIA; 4. LEO MARKADOMING GUS; 5. GENDRI; 6. IMBO.	KEPALA DESA PAHAWAN
26	25/G/2021/PTUN.PLK	26-10-2021	Dra. ADJIN WIDEN, SH	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA. - RUSLI (T II INT).
27	27/G/2021/PTUN.PLK	28-10-2021	1. ARISANDI ABEL; 2. KHRIS SUHARTA.	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS; - 1. MANJUNG; 2. RUDI KURNIASYAH; 3. MUHAMMAD GETSON; 4. YANUDIN; 5. REMA; 6. RUSMALA; 7. DINE APIL; 8. HARDIATIE; 9. GUNAWAN; (T II INT I - IX)
28	29/G/2021/PTUN.PLK	09-12-2021	YUSPIANSYAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Jumlah Perkara Yang Dicabut : 5 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL DICABUT	PENGGUGAT PEMOHON	TERGUGAT TERMOHON
01	6/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	18-02-2021	AMAT	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAPUAS
02	9/G/2021/PTUN.PLK (TENDER)	17-03-2021	MARTIASI UNIK GAWEI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU. DKK
03	23/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	15-06-2021	GANTIADI	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
04	30/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	27-10-2021	ERUJONO	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA
05	28/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	10-11-2021	1. SITAWATI MAYA DEWI; 2. ERWIN HUDOYONO HANDAYANI;	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi

1. Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding : 5 Perkara.

NO	NO PERKARA PERIHAL	TANGGAL PUTUS	PENGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON
01	24/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	07-01-2021	01. HIDEH; 02. DOLE; 03. UHING; 04. DEWI; 05. RUSIANA; 06. BAHING; 07. UNYE SAPIA; 08. INYOK; 09. LUHING; 10. RUSLIYA	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
02	7/G/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	09-06-2021	SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
03	17/G/2021/PTUN.PLK (DESA)	02-09-2021	RENOLD HADINATA	KEPALA DESA MADARA
04	27/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	28-10-2021	3. ARISANDI ABEL; 4. KHRIS SUHARTA.	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS; - 1. MANJUNG; 2. RUDI KURNIASYAH; 3. MUHAMMAD GETSON; 4. YANUDIN; 5. REMA; 6. RUSMALA; 7. DINE APIL; 8. HARDIATIE; 9. GUNAWAN; (T II INT I - IX)
05	29/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	09-12-2021	YUSPIANSYAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

2. Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi : 18 Perkara.

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PEMBANDING	TERBANDING
01	15/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 324/B/2020/PT.TUN.JKT (PERANGKAT DESA) HENDRIYONO <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA TURA	08-01-2021	KEPALA DESA TURA	HENDRIYONO
02	13/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 322/B/2020/PT.TUN.JKT (PERANGKAT DESA) SINDUN <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA TURA	12-01-2021	KEPALA DESA TURA	SINDUN
03	12/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 331/B/2020/PT.TUN.JKT (PERANGKAT DESA) 1. FAUZI KESUMA; 2. ANDI SETYO MARGONO; 3. NYAMIN; <u>MELAWAN</u> 1. KEPALA DESA KAMPUNG BARU; 2. a. MISRIYADI (TII.INT I); b. NONOK AGUS HARIANTO (TII.INT II); c. ABDUL ROHIM (TII.INT III);	01-02-2021	1. FAUZI KESUMA; 2. ANDI SETYO MARGONO; 3. NYAMIN;	1. KEPALA DESA KAMPUNG BARU; 2. a. MISRIYADI (TII.INT I); b. NONOK AGUS HARIANTO (TII.INT II); c. ABDUL ROHIM (TII.INT III);
04	14/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 323/B/2020/PT.TUN.JKT (PERANGKAT DESA) MISTORI <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA TURA	03-02-21	KEPALA DESA TURA	MISTORI
05	18/G/2020/PTUN.PLK Jo. 11/B/2021/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) RITA PERMATASARI, STr.Keb <u>MELAWAN</u> BUPATI KATINGAN	12-04-2021	BUPATI KATINGAN	RITA PERMATASARI, STr.Keb <i>Catatan : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</i>
06	27/G/2020/PTUN.PLK Jo. 77/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) MUNARI <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DODDY WONGSO	04-05-2021	MUNARI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DODDY WONGSO (TII.INT) <i>Catatan : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</i>

	(TII.INT)			
07	24/G/KI/2021/PTUN.PLK	24-08-2021	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
08	28/G/2020/PTUN.PLK Jo. 82/B/2021/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) LAOSMA PURBA <u>MELAWAN</u> BUPATI SERUYAN	28-06-2021	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN <i>Catatan : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</i>
09	5/G/2021/PTUN.PLK Jo. 162/B/2021/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) WANCINO <u>MELAWAN</u> BUPATI KATINGAN	26-08-2021	WANCINO	BUPATI KATINGAN <i>Catatan : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</i>
10	1/G/TF/2021/PTUN.PLK Jo. 136/B/TF/2021/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI <u>MELAWAN</u> 1. BUPATI SUKAMARA; 2. LURAH MENDAWAI	09-09-2021	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI	1. BUPATI SUKAMARA; 2. LURAH MENDAWAI
11	4/G/2021/PTUN.PLK Jo. 196/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) NIBEL, S.Sos <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DEDY SATRIA (TII.INT)	13-10-2021	NIBEL, S.Sos	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DEDY SATRIA (TII.INT)
12	10/G/2021/PTUN.PLK Jo. 188/B/2021/PT.TUN.JKT (DESA) GELLI P. MANAN <u>MELAWAN</u> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAUBUPATI KATINGAN	14-10-2021	GELLI P. MANAN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAUBUPATI KATINGAN
13	11/G/2021/PTUN.PLK Jo. 204/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) IBEN DM, SE <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA	15-11-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA	IBEN DM, SE <i>Catatan : Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</i>
14	16/G/2021/PTUN.PLK	02-12-2021	KEPALA DESA	1. SUHARDI;

	Jo. 235/B/2021/PT.TUN.JKT (DESA) 1. SUHARDI; 2. ISMAIL; 3. MISRAN; MELAWAN KEPALA DESA LIANG NAGA		LIANG NAGA	2. ISMAIL; 3. MISRAN;
15	14/G/2021/PTUN.PLK Jo. 248/B/2021/PT.TUN.JKT (DESA) 1. DARYONO 2. SALAMIAH MELAWAN KEPALA DESA BATUAH	13-12-2021	1. DARYONO 2. SALAMIAH	KEPALA DESA BATUAH
16	12/G/2021/PTUN.PLK Jo. 234/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) HARLISON MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR	13-12-2021	HARLISON	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
17	22/G/2021/PTUN.PLK Jo. 236/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) RENY FERI SULASTRI MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	14-12-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	RENY FERI SULASTRI
18	25/G/2021/PTUN.PLK Jo. 282/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) Dra. ADJIN WIDEN, SH MELAWAN - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - RUSLI (TII Int)	20-12-2021	- RUSLI (TII Int)	Dra. ADJIN WIDEN, SH

3. Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK : 36 Perkara

NO	NO PERKARA PERIHAL PARA PIHAK	TANGGAL PUTUS	PENGUGAT, PEMBANDING, PEMOHON KASASI	TERGUGAT, TERBANDING, TERMOHON KASASI
01	24/G/2020/PTUN.PLK (LAIN-LAIN)	07-01-2021	01. HIDEN; 02. DOLE; 03. UHING; 04. DEWI; 05. RUSIANA; 06. BAHING; 07. UNYE SAPIA; 08. INYOK; 09. LUHING; 10. RUSLIYA	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
02	7/G/2021/PTUN.PLK (KEPEGAWAIAN)	09-06-2021	SUGORO DARU PRADIBYO, S.I.P	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
03	17/G/2021/PTUN.PLK (DESA)	02-09-2021	RENOLD HADINATA	KEPALA DESA MADARA
04	27/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	28-10-2021	1. ARISANDI ABEL; 2. KHRIS SUHARTA.	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS; - 1. MANJUNG; 2. RUDI KURNIASYAH; 3. MUHAMMAD GETSON; 4. YANUDIN; 5. REMA; 6. RUSMALA; 7. DINE APIL; 8. HARDIATIE; 9. GUNAWAN; (T II INT I - IX)
05	29/G/2021/PTUN.PLK (PERTANAHAN)	09-12-2021	YUSPIANSYAH	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
06	15/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 324/B/2020/PT.TUN.JKT (PERANGKAT DESA) HENDRIYONO <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA TURA	08-01-2021	KEPALA DESA TURA	HENDRIYONO
07	13/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 322/B/2020/PT.TUN.JKT (PERANGKAT DESA) SINDUN <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA TURA	12-01-2021	KEPALA DESA TURA	SINDUN
08	12/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 331/B/2020/PT.TUN.JKT (PERANGKAT DESA) 4. FAUZI KESUMA; 5. ANDI SETYO MARGONO; 6. NYAMIN; <u>MELAWAN</u> 1. KEPALA DESA KAMPUNG BARU; 2. a. MISRIYADI (TII.INT I); b. NONOK AGUS	01-02-2021	4. FAUZI KESUMA; 5. ANDI SETYO MARGONO; 6. NYAMIN;	1. KEPALA DESA KAMPUNG BARU; 2. a. MISRIYADI (TII.INT I); b. NONOK AGUS HARIANTO (TII.INT II); c. ABDUL ROHIM (TII.INT III);

	HARIANTO (TII.INT II); c. ABDUL ROHIM (TII.INT III);			
09	14/G/2020/PTUN.PLK. Jo. 323/B/2020/PT.TUN.JKT (PERANGKAT DESA) MISTORI <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA TURA	03-02-21	KEPALA DESA TURA	MISTORI
10	18/G/2020/PTUN.PLK Jo. 11/B/2021/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) RITA PERMATASARI, STr.Keb <u>MELAWAN</u> BUPATI KATINGAN	12-04-2021	BUPATI KATINGAN	RITA PERMATASARI, STr.Keb
11	27/G/2020/PTUN.PLK Jo. 77/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) MUNARI <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DODDY WONGSO (TII.INT)	04-05-2021	MUNARI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DODDY WONGSO (TII.INT)
12	24/G/KI/2021/PTUN.PLK	24-08-2021	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	DEDI SUSANTO
13	28/G/2020/PTUN.PLK Jo. 82/B/2021/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) LAOSMA PURBA <u>MELAWAN</u> BUPATI SERUYAN	28-06-2021	LAOSMA PURBA	BUPATI SERUYAN
14	5/G/2021/PTUN.PLK Jo. 162/B/2021/PT.TUN.JKT (KEPEGAWAIAN) WANCINO <u>MELAWAN</u> BUPATI KATINGAN	26-08-2021	WANCINO	BUPATI KATINGAN
15	1/G/TF/2021/PTUN.PLK Jo. 136/B/TF/2021/PT.TUN.JKT (LAIN-LAIN) Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI <u>MELAWAN</u> 3. BUPATI SUKAMARA; 4. LURAH MENDAWAI	09-09-2021	Hj. RUSLIA SAHIDUL JUHARI	1. BUPATI SUKAMARA; 2. LURAH MENDAWAI
16	4/G/2021/PTUN.PLK Jo. 196/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN)	13-10-2021	NIBEL, S.Sos	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA

	NIBEL, S.Sos <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA - DEDY SATRIA (TII.INT)			- DEDY SATRIA (TII.INT)
17	10/G/2021/PTUN.PLK Jo. 188/B/2021/PT.TUN.JKT (DESA) GELLI P. MANAN <u>MELAWAN</u> PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAUBUPATI KATINGAN	14-10-2021	GELLI P. MANAN	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TANGKAHEN, KECAMATAN BANAMA TINGANG, KABUPATEN PULANG PISAUBUPATI KATINGAN
18	11/G/2021/PTUN.PLK Jo. 204/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) IBEN DM, SE <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA	15-11-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA	IBEN DM, SE
19	14/G/2021/PTUN.PLK Jo. 248/B/2021/PT.TUN.JKT (DESA) 1. DARYONO 2. SALAMIAH <u>MELAWAN</u> KEPALA DESA BATUAH	13-12-2021	1. DARYONO 2. SALAMIAH	KEPALA DESA BATUAH
20	12/G/2021/PTUN.PLK Jo. 234/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) HARLISON <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR	13-12-2021	HARLISON	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
21	22/G/2021/PTUN.PLK Jo. 236/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) RENY FERI SULASTRI <u>MELAWAN</u> KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	14-12-2021	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA	RENY FERI SULASTRI
22	25/G/2021/PTUN.PLK Jo. 282/B/2021/PT.TUN.JKT (PERTANAHAN) Dra. ADJIN WIDEN, SH <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - RUSLI (TII Int)	20-12-2021	- RUSLI (TII Int)	Dra. ADJIN WIDEN, SH
23	19/G/2019/PTUN.PLK Jo. 28/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 349 K/TUN/2020	14-09-2020	PIRI AHADI	BUPATI SUKA MARA Catatan :

	(KEPEGAWAIAN) PIRI AHADI <u>MELAWAN</u> BUPATI SUKAMARA			Berkas diterima tanggal 04-01-2021
24	21/G/2019/PTUN.PLK Jo. 72/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 479 K/TUN/2020 (KEPEGAWAIAN) H. MALIK MULIAWAN, SH <u>MELAWAN</u> BUPATI BARITO UTARA	14-10-2020	H. MALIK MULIAWAN, SH	BUPATI BARITO UTARA Catatan : Berkas diterima tanggal 04-01-2021
25	24/G/2019/PTUN.PLK Jo. 113/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 528 K/TUN/2020 (PERTANAHAN) NOORYANIE DARHAMSAYAH <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - MENTERI KEUANGAN RI (TII INT)	24-11-2020	NOORYANIE DARHAMSAYAH	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - MENTERI KEUANGAN RI (TII INT) Catatan : Berkas diterima tanggal 08-02-2021
26	16/G/2019/PTUN.PLK Jo. 19/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 372 K/TUN/2020 (KEPEGAWAIAN) LELO ANGGORO, S.STP.,MAP <u>MELAWAN</u> WALIKOTA PALANGKA RAYA	28-09-2020	LELO ANGGORO, S.STP.,MAP	WALIKOTA PALANGKA RAYA Catatan : Berkas diterima tanggal 29-03-2021
27	22/G/2019/PTUN.PLK Jo. 112/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 521 K/TUN/2020 (PERIJINAN) PT. GAUNG ALAM SEMESTA <u>MELAWAN</u> BUPATI KATINGAN	24-11-2020	PT. GAUNG ALAM SEMESTA	BUPATI KATINGAN Catatan : Berkas diterima tanggal 23-04-2021
28	27/G/2019/PTUN.PLK Jo. 134/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 541 K/TUN/2020 (KEPEGAWAIAN) Drs. DAGUT, SH.,MT <u>MELAWAN</u> GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	08-12-2020	Drs. DAGUT, SH.,MT	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Catatan : Berkas diterima tanggal 05-05-2021
29	18/G/2019/PTUN.PLK Jo. 27/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 393 K/TUN/2020 (KEPEGAWAIAN) ANDI JAYANDI <u>MELAWAN</u> BUPATI SUKAMARA	23-11-2020	ANDI JAYANDI	BUPATI SUKAMARA Catatan : Berkas diterima tanggal 08-07-2021
30	5/G/2019/PTUN.PLK Jo. 259/B/2019/PT.TUN.JKT Jo. 124 K/TUN/2020 (PERTANAHAN) Hj. HAIMAH <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - MAULIDA (TII INT)	16-04-2020	MAULIDA (TII.INT)	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA; - Hj. HAIMAH (PENGGUGAT) Catatan : Berkas diterima tanggal 15-11-2021

31	31/G/2019/PTUN.PLK Jo. 215/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 139 K/TUN/2021 (PERTANAHAN) ARMAN MUIS <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA	01-04-2021	ARMAN MUIS	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA; - PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
32	23/G/KI/2020/PTUN.PLK Jo. 133 K/TUN/2021 (KI) NORLITA FEBRIANI <u>MELAWAN</u> KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA	30-03-2021	NORLITA FEBRIANI	KEPOLISIAN RESOR KOTA PALANGKA RAYA
33	26/G/2019/PTUN.PLK Jo. 151/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 55 K/TUN/2021 (DESA) TATI, S.PD <u>MELAWAN</u> 1. BUPATI KAPUAS; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HURUNG KAMPIN KECAMATAN PASAK TALAWANG, KABUPATEN KAPUAS; ASON.	02-02-2021	TATI, S.PD	1. BUPATI KAPUAS; 2. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA HURUNG KAMPIN KECAMATAN PASAK TALAWANG, KABUPATEN KAPUAS; 3. ASON.
34	11/G/2020/PTUN.PLK Jo. 303/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 192 K/TUN/2021 (PERTANAHAN) SUHANDI <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWIRINGIN BARAT; - MUHAMMAD JAINURI (TII INT)	02-06-2021	SUHANDI	- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWIRINGIN BARAT; - MUHAMMAD JAINURI (TII INT)
35	9/G/2020/PTUN.PLK Jo. 260/B/2020/PT.TUN.JKT Jo. 227 K/TUN/2021 (PERTANAHAN) TOMMY TANUWIDJAJA <u>MELAWAN</u> - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAWARINGIN TIMUR; - TRI DARTAHENA (TII INT).	22-07-2021	- TRI DARTAHENA, SH.,M.Kn KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	TOMMY TANUWIDJAJA
36	19/G/2020/PTUN.PLK Jo. 23/B/2021/PT.TUN.JKT Jo. 343 K/TUN/2021 (PERIZINAN)	21-09-2021	PT. PADANG MULIA	- BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA (TII INT)

	PT. PADANG MULIA <u>MELAWAN</u> - BUPATI BARITO TIMUR; - PT. ANUGERAH KREASI KARYA (TII INT)			
--	--	--	--	--



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/ ~~488~~ /WK/KP.08.08/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- Bahwa, dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama;
 - Bahwa, menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, Tanggal 27 November 2020, Hal Penyampaian Dokumen SAKIP;
 - Bahwa, untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah/Lembaga;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/306/K/KP.08.08/II/2020, Tanggal 04 Februari 2020, Tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua** : Membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :
1. Pelindung : ANDRY ASANI, S.H., M.H.
 2. Ketua : MOHAMAD YUSUP, S.H.
 3. Sekretaris : HERU PAMUNGKAS, S.T.
 4. Anggota :
 1. CUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H.
 2. PATAR SIPAHUTAR, S.H.
 3. RUSMINI SIAGIAN, S.H.
 4. SALEHA, S.E.
 5. PUSPHITARIA B. P., S.Pd., S.H.
 6. WIWIK KRISNAWATI, S.Kom.
- Ketiga** : Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama bertugas mereviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2021 dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat** : Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama dinyatakan berakhir dengan sendirinya apabila tugas-tugas yang dibebankan kepadanya telah selesai dilaksanakan;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 4 Januari 2021

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

WAKIL KETUA


ANDRY ASANI, S.H., M.H.
NIP. 19710409 199603 1 001